

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah bidang pendidikan, sebab pendidikan pilar utama pembangunan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tingkat pendidikan anak sebagai bekal pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Hadikusumo (dalam Deny 2004) menyatakan bahwa faktor pendidikan merupakan modal dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan, penciptaan lapangan kerja yang produktif maupun pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karena itu pendidikan nasional bertujuan mempersiapkan masyarakat baru yang lebih ideal, yaitu masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban dan berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Esensi dari tujuan pendidikan nasional adalah proses menumbuhkan bentuk budaya keilmuan, sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik dalam perspektif tertentu harus mengacu pada masa depan yang jelas. Melalui kegiatan pendidikan, gambaran tentang masyarakat yang ideal itu dituangkan dalam alam pikiran peserta didik sehingga terjadi proses pembentukan dan perpindahan budaya. Pemikiran ini mengandung makna bahwa lembaga pendidikan sebagai tempat pembelajaran manusia memiliki fungsi sosial.

Lembaga Pendidikan (baik formal, non formal atau informal) adalah tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban). Melalui praktik pendidikan, peserta didik diajak untuk memahami bagaimana sejarah atau pengalaman budaya dapat ditransformasi dalam zaman kehidupan yang akan mereka alami serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, makna pengetahuan dan kebudayaan sering kali dipaksakan untuk dikombinasikan karena adanya pengaruh zaman terhadap pengetahuan jika ditransformasikan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan tempat pemberian ilmu dari guru kepada murid sebaiknya menunjang pemberian ilmu tersebut dengan berusaha memberikan ilmu tersebut secara lengkap dan menyeluruh sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku. Sekolah sebagai tempat para siswa melakukan praktek atau melakukan daya kreasi atau daya imajinasi yang sesuai dengan yang diajarkan guru, sebaiknya memberikan sarana yang menunjang dalam melakukan atau mewujudkan daya imajinasinya itu. Selain itu sekolah juga sebagai tempat

bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya, guru atau dengan karyawan yang ada dalam sekolah tersebut berusaha memberikan layanan terbaiknya agar anak dapat berinteraksi dengan baik dan anak tidak merasa tertekan atau tidak senang dengan berada dalam sekolah.

Namun pada kenyataannya sekarang sarana pendidikan atau sekolah khususnya belum menampakkan fungsinya yang baik. Masih banyak kekurangan gedung sekolah yang ada di Indonesia umumnya dan pada daerah-daerah pelosok khususnya. Alasan yang pokok adalah kurang terjangkaunya daerah tersebut oleh peralatan-peralatan yang modern. Selain itu fasilitas yang ada pada sekolah-sekolah sangat kurang dan jauh dari cukup. Terlebih pada daerah pinggiran kota yang kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Masih terdapatnya kekurangan-kekurangan seperti atap sekolah yang akan runtuh, tembok sekolah yang mengelupas sampai ada salah satu kelas yang sudah rata dengan tanah.

Dengan melihat keadaan riil yang ada pada sekolah-sekolah di Indonesia, sungguh menyedihkan memang melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut. Peran pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan sangat penting disamping memberikan sebagian anggarannya untuk pendidikan, beliau harus tahu sendiri keadaan yang ada pada sekolah-sekolah di daerah-daerah. Selain itu sudah sepantasnyalah warga masyarakat lebih mengutamakan pendidikan anaknya daripada memikirkan hal-hal yang lain.

Pendidikan merupakan satu-satunya jalan bagi bangsa kita dalam mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Perkembangan pendidikan di negara kita di pengaruhi juga oleh penyebaran sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Baik itu

SD, SMP maupun SMA. Penyebaran sekolah akan mempengaruhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat. Sekolah merupakan fasilitator bagi dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak Indonesia yaitu tingkat SD (sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan hal itu telah di laksanakan. Tidak hanya itu, setelah tamat SMP pelajar SMP dapat melanjutkan pendidikan ke SMA (Sekolah Menengah Atas). Besarnya jumlah penduduk disuatu daerah akan menuntut fasilitas kehidupan yang lebih besar pula. Baik itu menyangkut penyediaan tempat tinggal, lapangan pekerjaan, dan layanan sosial seperti tempat peribadatan, pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, rekreasi dan pelayanan jasa. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penduduk yang sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional khususnya dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan. Tujuan utama dari pemberian pengetahuan di sekolah kepada generasi muda adalah mencetak para calon penemu dan pembaharu di masa depan (Daljoni, 1985).

Dalam hal ini semua turut berperan di dalam meningkatkan pembangunan nasional. Analisis persebaran sekolah menengah utamanya dilakukan untuk mendukung rencana pencapaian visi pada tahun 2009 untuk wajib belajar 12 tahun ([http://theplanner.wordpress.com/2008/02/22/evaluasi persebaran saranapendidikan menengah dalam rangka peningkatan-aksesibilitas-sekolah/](http://theplanner.wordpress.com/2008/02/22/evaluasi-persebaran-saranapendidikan-menengah-dalam-rangka-peningkatan-aksesibilitas-sekolah/), diakses 19 mei 2012 pukul 20.15 wib)

Pendidikan di SMA diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak di lakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMA negeri dan swasta di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, SMA negeri maupun swasta merupakan unit pelaksanaan teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Begitu juga dengan Kabupaten Langkat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara pendidikan di SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah pemerintah Kabupaten. Langkat merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Menurut hasil pendataan dan pendaftaran penduduk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2010/2011 jumlah penduduk Kabupaten Langkat sebanyak 1.057.768 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah (15-18 tahun) sebesar 89.665 jiwa. Penduduk Kabupaten Langkat yang terdaftar di sekolah menengah atas sebanyak 15.724 jiwa yang tersebar di 63 sekolah menengah atas. Jumlah tenaga kependidikan di Kabupaten Langkat sebanyak 1.734 orang. (Sumber: BPS Kabupaten Langkat)

Jumlah fasilitas gedung yang ada di Kabupaten Langkat berjumlah 63 buah gedung diantaranya: 18 buah gedung milik pemerintah (Sekolah Menengah Umum Negeri) dan 45 buah gedung milik swasta (Sekolah Menengah Umum Swasta). Mengingat pendidikan itu sangat luas sifatnya, maka didalam penelitian ini hanya dibatasi pada sekolah menengah umum meliputi Negeri dan Swasta saja.

Berdasarkan observasi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat terdapat beberapa sekolah yang memiliki daya tampung melebihi kapasitas tetapi masih banyak juga di beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat daya tampungnya di bawah kapasitas. Selain masalah daya tampung dari pusat data statistik Langkat diketahui bahwa persebaran sekolah berbeda-beda pada tiap sekolah, bahkan ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki Sekolah Menengah Atas.

Persebaran sekolah yang tidak merata sangat bertentangan dengan jumlah anak usia sekolah ditiap Kecamatan, ini dapat dilihat dari 23 Kecamatan yang ada, misalnya di kecamatan Gebang yang memiliki anak usia sekolah menengah atas sebesar 4.147 jiwa tetapi hanya tersedia 1 sekolah, di Kecamatan Batang Serangan yang memiliki anak usia sekolah menengah atas sebesar 4.507 jiwa tetapi hanya memiliki 1 sekolah menengah atas, bahkan di 2 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kutambaru dan Kecamatan Pematang Jaya yang masing-masing memiliki angka anak usia sekolah menengah atas sebesar 1.060 dan 1.133 tidak memiliki sekolah sama sekali (Sumber: BPS Langkat)

Program pemerintah terhadap sekolah menengah atas di setiap Kecamatan seharusnya dibangun SMA Negeri maupun Swasta. Tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Langkat tidak semua kecamatannya memiliki SMA baik negeri maupun swasta. Pada umumnya hanya terkonsentrasi di ibukota Kabupaten Langkat saja sedangkan kecamatan-kecamatan lain rata-rata hanya memiliki 1 dan 2 sekolah dan bahkan ada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat tidak memiliki SMA sama sekali.

B. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah di atas adalah masalah: (1) pentingnya pembangunan SMA di Kabupaten Langkat, (2) persebaran SMA yang masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten saja, (3) kebutuhan pendidikan dan pemanfaatan masyarakat akan sekolah menengah atas sangat mendesak, (4) persebaran sekolah menengah atas yang tidak merata dengan anak usia sekolah menengah atas di Kabupaten Langkat dan (5) belum terpenuhinya fasilitas pendidikan dengan baik di Kabupaten Langkat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah (1) persebaran sekolah di Kabupaten Langkat, (2) persebaran anak usia sekolah di Kabupaten Langkat dan (3) kesesuaian antara letak sekolah dengan persebaran anak usia sekolah

D. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana persebaran sekolah (SMA) di Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana persebaran anak usia sekolah (SMA) di Kabupaten Langkat ?
3. Bagaimana kesesuaian antara letak sekolah (SMA) dengan persebaran anak usia sekolah (SMA) di Kabupaten Langkat ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyebaran SMA di Kabupaten Langkat dilihat dari letak geografisnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana persebaran anak usia sekolah (SMA) di Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara letak sekolah (SMA) dengan persebaran anak usia sekolah (SMA) di Kabupaten Langkat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan nantinya akan memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai informasi dan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Langkat.
2. Sebagai informasi dan saran kepada pemerintah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Langkat
3. Memberikan acuan dan bahan referensi bagi penelitian lain yang relevan dengan tema penelitian ini.
4. Sebagai bahan referensi bagi mata kuliah yang relevan.